

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 1 dan

Pemprov Didesak Turun Tangan

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

SEMARANG - Masih banyak rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jateng yang belum ditindaklanjuti pemerintah kota (pemkot)/pemerintah kabupaten (pemkab) di Jateng.

DPRD Jateng mendesak Pemprov untuk turun tangan. Jika perlu, Pemprov menggelar monitoring dan evaluasi terkait rekomendasi yang belum atau mengalami kendala untuk ditindaklanjuti.

Anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputro mengatakan, pemkot/pemkab dan Pemprov yang telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) wajib mempertahankannya. Selain itu, semua rekomendasi dari BPK wajib ditindaklanjuti. Kepala daerah atau sekretaris daerah (Sekda) selaku ketua TAPD harus menginstruksikan semua SKPD menindaklanjutinya.

Implikasi Hukum

"Jangan sampai berimplikasi pada hukum," kata Sriyanto, Rabu (28/11).

Pada semester I 2018, BPK Perwakilan Jateng mencatat 11.036 temuan pemeriksaan dengan 25.060 rekomendasi. Dari total rekomendasi yang ada, sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi 21.084 (84,13%), sudah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi atau belum ditindaklanjuti sama sekali sebanyak 3.966 (15,82%), dan tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 10 rekomendasi (0,03%). Menurut Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng ini, rekomendasi perlu ditindaklanjuti karena bisa mempengaruhi opini pada pemerintahan.

Anggota Komisi A lainnya Amir Darmanto mengatakan, rekomendasi BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus disikapi serius oleh pemerintah daerah. Apalagi jika dalam pemeriksaan menunjukkan ada temuan BPK.

"Bagi pemerintah yang belum menyelesaikan rekomendasi atau belum menindaklanjutinya harus segera melaksanakan," kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPK Jateng Hery Subowo mengatakan, pihaknya telah memantau atas tindak lanjut rekomendasi BPK pada akhir Juli 2018. Sebagian pemerintah daerah telah melaksanakan rekomendasi, namun ada yang belum selesai. Salah satunya, persoalan pengelolaan aset yang belum tertib. (H81-41)